

PENUNDAAN RAPERDA BPRS PERSOALAN TEKNIS

Kepala Daerah Jamin Komitmen Bangun Ekonomi Syariah

YOGYA (KR) - Kepala daerah Kota Yogya menjamin komitmennya dalam membangun ekonomi syariah melalui sektor keuangan. Penundaan rancangan peraturan daerah (raperda) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dibahas tahun ini pun dinilai karena persoalan teknis.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk mendirikan BPRS. "Kalau sekarang kita bahas akan kesulitan menentukan kapan pembentukan dimulai. Misal diputuskan tahun 2023, kalau kondisi keuangan belum mampu justru kita tidak bisa menjalankan amanat perda. Jadi hanya soal teknis karena kondisi darurat," katanya, Jumat (27/8).

Di samping itu, penundaan

tersebut bukan berarti Pemkot tidak akan mengajukan raperda BPRS kembali. Pengajuan akan tetap dilakukan jika kondisi sudah memungkinkan. Terutama menyangkut kondisi perekonomian dan kemampuan Pemkot. Kendati dalam RPJMD 2017-2022 sudah disebutkan terkait kepemilikan BPRS namun bukan berarti haluan visi misi kepala daerah tersebut perlu direvisi.

Menurut Heroe, makna kepemilikan bisa diartikan cukup luas.

Salah satunya jika harus dibentuk melalui perseroan terbatas (PT) dengan melibatkan pihak lain. Sehingga hal itu bisa dipersepsikan dengan menanam saham di perbankan syariah yang sudah ada, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. "Makanya ada opsi kita lakukan penyertaan modal di bank syariah yang sudah ada untuk penguatan. Dengan membeli saham berarti juga ada kepemilikan. Tapi komitmen untuk menumbuhkan bank syariah tetap kita jalankan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Heroe menjamin janji kepala daerah terkait ekonomi syariah tidak akan terabaikan. Hanya, untuk sementara lebih bersifat pembelian saham di bank syariah yang sudah

berdiri. Sedangkan untuk membentuk bank syariah secara mandiri masih terus diupayakan sembari mempertimbangkan kemampuan daerah. Apalagi bank syariah sudah tidak bisa lagi menjadi satu dengan bank konvensional sehingga harus berdiri sendiri.

Sebelumnya, rencana pembahasan raperda BPRS menjadi dinamika di kalangan dewan. Sejumlah fraksi memiliki pandangan berbeda sehingga rencana pembentukan panitia khusus (pansus) belum kandas. Terakhir, pada 19 Agustus 2021 lalu walikota mengajukan surat ke dewan terkait penundaan raperda BPRS yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021. (Dhi)-f

Adi Gemawan Kepala BPKP DIY



KR-Riyana Ekawati

Sri Sultan HB X bersama Iwan Taufiq Purwanto usai pelantikan.

YOGYA (KR) - Keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY diharapkan dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut penting untuk mengedukasi aparat pengawasan, panewu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar lebih berdaya dalam mengawal keuangan desa. Sehingga proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan memberikan pemahaman dasar yang mudah dipahami, panewu dan BPD dapat melakukan pengawasan sekaligus mengedukasi para Lurah dalam prioritas penggunaan dana desa untuk akselerasi penanaman Covid-19.

"Peran audit BPKP bukan lagi sebagai watchdog, tetapi konsultan yang memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan good governance. Dengan demikian, peran Internal Auditor Pemda menjadi lebih berdaya guna dalam mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Dengan usaha demikian, berarti punya kontribusi dalam turut serta menekan besarnya sisa anggaran daerah yang belum digunakan," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada pelantikan Kepala BPKP DIY periode 2021-2024 Adi Gemawan, Ak MM, di Bangsal Kepatihan, Kamis (26/8). Adi Gemawan menggantikan Kepala BPKP DIY sebelumnya Slamet Tulus Wahyana yang sudah memasuki masa purna tugas.

Sultan mengatakan, adanya kondisi kedaruratan idealnya menjadikan BPKP bersama APIP hendaknya peka dan sigap serta memiliki sense of crisis. Terutama dalam mengembangkan adaptasi-kondisional tool yaitu sebuah metode pengawasan yang fleksibel situasional, tetapi tetap dalam jalur internal audit yang jauh dari itikad penyimpangan anggaran. Hal ini tentu memerlukan petunjuk praktis di lapangan hingga ke tingkat kelurahan, agar mereka lebih cepat bertindak menggunakan anggaran bagi keselamatan rakyatnya dalam koridor yang juga bisa dipertanggungjawabkan. (Ria/Ira)-f

AKSES VAKSINASI TETAP DIPERMUDAH Warga Rentan Diimbau Urus Kependudukan

YOGYA (KR) - Program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah turut menasar warga rentan. Salah satunya dari kelompok transgender namun diimbau untuk segera mengurus administrasi kependudukan.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya Bram Prasetyo, pemerintah mempermudah akses vaksinasi bagi warga rentan tersebut. "Dari kesepakatan, warga dari kelompok transgender dapat mengakses vaksinasi terlebih dulu untuk kemudian diminta komitmennya mengurus identitas kependudukan," jelasnya, Jumat (27/8).

Administrasi kependudukan tersebut sangat penting agar dapat terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Melalui aplikasi tersebut ada kemudahan dalam mengunduh sertifikat vaksin guna mengakses berbagai layanan publik yang mensyaratkan kartu vaksin.

Bram mengatakan, kelompok transgender yang sudah divaksin dapat langsung datang ke Kantor Dindikcapil kemudian mengisi data yang dibutuhkan. Data-data tersebut kemudian diverifikasi. "Dimungkinkan disertai dengan tanya jawab secara langsung dan apabila data yang disampaikan sudah dinyatakan kebenaran-

nya, maka identitas kependudukan bisa diterbitkan," imbuhnya.

Kesepakatan yang dibangun antara pemerintah dengan kelompok transgender merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada warga rentan untuk dapat mengakses vaksinasi Covid-19 tetapi juga mendapat identitas kependudukan. Identitas kependudukan yang akan diperoleh di antaranya adalah KTP elektronik dan kartu keluarga (KK) yang di dalamnya sudah mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK). NIK tersebut dapat digunakan untuk pendataan vaksinasi yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Sepanjang 2021, Dindikcapil Kota Yogya belum menerbitkan satu pun KTP elektronik untuk warga rentan dari kelompok transgender. Bram mengaku, pernah melakukan pendataan berkoordinasi dengan salah satu institusi yang menangani kelompok transgender. Ada delapan data yang sudah masuk namun tidak ada satu pun yang bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan identitas kependudukan.

Hal ini karena berbagai sebab, di antaranya ada warga yang sudah memiliki NIK dari kabupaten lain, atau tidak menyampaikan syarat yang dibutuhkan, bahkan ada warga dari luar negeri. (Dhi)-f

Bantuan Siswa Terdampak Covid-19 Jangan Tertunda

YOGYA (KR) - Program bantuan bagi siswa yang terdampak Covid-19 diharapkan jangan sampai tertunda. Terutama siswa yang kehilangan orangtua akibat meninggal dunia terpapar Covid-19.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi, menuturkan bantuan berupa jaminan pendidikan sudah dialokasikan melalui rancangan APBD perubahan 2021. "Dalam pembahasan sudah dialokasikan anggaran bantuan kepada siswa yang kehilangan orangtua karena Covid-19. Bantuan harus bisa segera dicairkan jika APBD perubahan sudah ditetapkan karena dibutuhkan," katanya, Kamis (26/8).

Bantuan jaminan pendidikan untuk siswa yang kehilangan orangtua atau wali asuhnya tersebut rencananya diberikan per semester selama satu tahun. Berdasarkan data, Ali Fahmi menyebut terdapat 261 siswa yang masuk dalam kartu keluarga atau ber-KTP Kota Yogya yang kehilangan orangtua atau wali asuhnya karena Covid-19.

Dari 261 siswa tersebut, sebanyak 14 siswa sudah masuk dalam data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogya. Sehingga sudah terlebih dulu mendapat bantuan dana dari Kartu Jogja Berprestasi. "Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga siswa. Sehingga siswa pun tetap dapat menjaga keberlangsungan proses belajar siswa untuk kebutuhan pendidikan," imbuhnya.

Total alokasi anggaran untuk bantuan kepada siswa yang akan dimasukkan dalam rancangan APBD perubahan 2021 sebesar Rp 239,95 juta. Di jenjang TK tercatat sebanyak 15 siswa yang akan mendapat bantuan Rp 400.000 per semester, SD negeri 60 siswa dibantu Rp 400.000 per semester, SD swasta 38 siswa dibantu Rp 1,4 juta per semester, SMP negeri 54 siswa dengan bantuan Rp 500.000 per semester.

Kemudian SMP swasta 28 siswa mendapat bantuan Rp 2 juta per semester, SMA negeri 38 siswa dibantu Rp 875.000 per semester, dan SMA swasta empat siswa dengan bantuan Rp 2,25 juta per semester, SMK negeri 17 siswa dengan bantuan Rp 875.000 per semester, dan SMK swasta tujuh siswa dengan bantuan Rp 2,375 juta per semester. (Dhi)-f

VAKSINASI 'BHINNEKA TUNGGAL IKA'

Sasar Mahasiswa dari Luar DIY

YOGYA (KR) - Gerakan Kemanusiaan Republik Indonesia (GKR Indonesia) akan mengadakan vaksinasi massal (dosis pertama) bertajuk 'Bhinneka Tunggal Ika' di Sasana Hinggil Kraton Yogyakarta, 30-31 Agustus 2021. Sasaran vaksinasi ini adalah mahasiswa luar DIY yang sedang studi di Yogya.

Permaisuri Kraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan, tema Bhinneka Tunggal Ika ini dipilih sebagai salah satu wujud upaya GKR Indonesia ikut mengambil peran dalam merawat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat kebersamaan dan gotong royong di antara komponen warga sangat diperlukan, terlebih saat pandemi Covid-19.

"Vaksinasi kali ini memiliki slogan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Tekad, Maju Bersama," kata Hemas saat jumpa pers di Bale

Raos Kraton Yogyakarta, Jumat (27/8). Turut hadir mendampingi GKR Hemas, perwakilan calon peserta vaksin (mahasiswa) dari Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi, Bali dan Papua dengan mengenakan busana adat daerah masing-masing.

Menurut Hemas, vaksinasi massal 'Bhinneka Tunggal Ika' menyediakan kuota sebanyak 2.000 dosis. Pelaksanaan vaksinasi juga terasa spesial karena berbarengan dengan momentum peringatan sembilan tahun disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2012.

Vaksinasi Bhinneka Tunggal Ika rencananya akan disambut dan dimeriahkan komunitas pelestari seni keprajuritan rakyat. Mereka akan melakukan defile dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Alun-alun Selatan. (Dev)-f

LKKS BK3S DIY

Pelatihan Perawatan Gigi dan Mulut



KR - Wulan Yanuarwati

Pelatihan Penatalaksanaan Perawatan Gigi dan Mulut Bagi Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

YOGYA (KR) - Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) BK3S DIY menggandeng Dinas Sosial DIY memberikan pelatihan Penatalaksanaan Perawatan Gigi dan Mulut Bagi Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19 bagi anak-anak di panti, mengingat sumber penularan tercepat berasal dari mulut.

"Harapannya pascapelatihan tidak hanya bermanfaat saat menghadapi pan-

demi tapi jadi habit (kebiasaan). Karena kalau materi ini disadari betul, tidak hanya menanggulangi penyakit medis tapi juga penyakit sosial," ujar Ketua Umum LKKS BK3S DIY, Untung Sukaryadi pada pembukaan acara, Jumat (27/8) di Aula Kantor LKKS BK3S DIY.

"Misalnya anak yang bermasalah mulut dan gigi rentan bullying, itu masalah sosial. Jadi kalau jadi habit maka anak-anak sehat dalam kehidupan sosialnya juga," imbuhnya.

Wakil Ketua BK3S Sugiyanto mengatakan pelatihan diikuti puluhan pengasuh LKSA yang tersebar di DIY dengan nara sumber Drg Laelia Dwi Anggraini dari Fakultas Kedokteran Gigi UMY. Kegiatan berlangsung dengan paparan materi dan peragaan secara langsung sehingga dapat diperoleh gambaran jelas.

Sugiyanto menyebut pandemi Covid-19 membuat Standard Operational Procedure (SOP) harus berubah sebab apabila masih menggunakan pola lama, maka akan sangat rentan terjadi penularan virus di lingkup tersebut.

Sementara itu, Drg Laelia Dwi Anggraini berharap pengasuh LKSA dapat menjadi duta perubahan perilaku terutama masalah kesehatan gigi dan mulut meskipun dinilai tidak mudah. Sebab kesehatan mulut menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan pada masa pandemi Covid-19. (R-1)-f

DPDR KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PEMBELAJARAN DARING MULAI MENJENUHKAN Serba Covid-19, RS Jangan Sampai Krisis Kepercayaan

YOGYA (KR) - Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun menimbulkan berbagai persoalan pelik. Salah satunya kesan yang muncul dari masyarakat ketika hendak berobat ke rumah sakit. Sehingga jangan sampai RS mengalami krisis kepercayaan.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta Yogo Prasetyo Pri Hutomo, mengungkapkan proses skrining Covid-19 bagi pasien yang datang ke rumah sakit hendaknya dilakukan secara adaptif. "Saat ini di masyarakat seperti begitu masuk rumah sakit disodori form yang menyatakan kalau terkena Covid-19 atau tidak. Lha otomatis kan di swab dulu, di saat menunggu hasilnya harus diisolasi dulu. Masyarakat sanksi dengan itu semua, dengan bahasa dicovidkan," akunya.

Upaya skrining tersebut memang diperlukan untuk menjamin keamanan semua pihak. Akan tetapi jangan sampai justru skrining menjadi tujuan utama. Sementara harapan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan justru

Yogo Prasetyo Pri Hutomo Fraksi Golkar



KR-Istimewa

semakin sulit terakses. Kondisi itu bisa berujung krisis kepercayaan dari masyarakat dan kewajiban negara dalam menjamin kesehatan warganya bisa terabaikan.

Oleh karena itu, Tomo sapaan akrabnya, berharap Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan layanan di rumah sakit, termasuk RS swasta. "Tolong diberikan pengawasan ke rumah sakit biar kepercayaan masyarakat

kat. Terkadang ada bahasa di masyarakat kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit karena persepsi yang selalu disangkut pautkan dengan Covid-19," tandasnya.

Selain masalah kesehatan, aspek pendidikan juga tidak kalah pelik. Terutama dengan sistem pembelajaran daring yang sudah mulai menjenuhkan. Tomo mengaku tidak sedikit orangtua yang kewalahan dengan pembelajaran daring. Banyak yang khawatir mengenai asupan ilmu pengetahuan yang tidak bisa diserap secara optimal oleh anak didik. Hal itu pun bisa berdampak pada generasi bangsa yang akan datang.

Baik masalah kesehatan maupun pendidikan, pemerintah seharusnya memiliki langkah solutif. Pasalnya kedua aspek tersebut merupakan hak masyarakat serta menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. "Jangan memunculkan rasa ketakutan di masyarakat. Sebaliknya, berikan pengayoman supaya masyarakat tenang dan mampu menjalani kehidupan dengan baik," katanya. (Dhi)-f